LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya jua, Laporan Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2020 ini dapat kami selesaikan secara tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan hadirnya beliau ke dunia ini membawa cahaya yang dapat menerangi kegelapan di alam semesta.

Laporan kinerja yang disusun ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Bappeda di tahun 2020. Tahun yang penuh dengan dinamika sehingga semua SKPD harus melakukan penyesuaian terkait dengan kondisi pandemi, refocusing anggaran dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 yang merubah kodifikasi dan numenklatur program dan kegiatan yang berimbas pada penyesuaian yang memakan energi yang luar biasa banyaknya dari semua SKPD. Sebuah fenomena yang secara kasat mata menyebabkan menurunnya intensitas kegiatan pada semua sektor. Dengan kondisi yang demikian maka penggambaran terhadap bagaimana kinerja Bappeda Tanah Laut pada tahun 2020 kami harapkan dapat tergambar pada laporan kinerja ini.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Bappeda

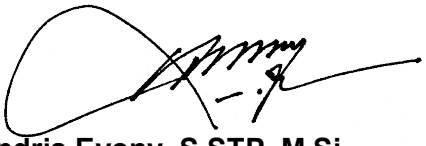

Andris Evony, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790928 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 2
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi 1
C. Isu Strategis 12
D. Produk dan Layanan 16
E. Sistematika Penyajian 17

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 18
A. Visi RPJMD 18
B. Misi RPJMD 18
C. Tujuan dan Sasaran Strategis 19
D. Indikator Kinerja Utama 22
E. Perjanjian Kinerja 22
F. Program dan Kegiatan 27

Bab III Akuntabilitas Kinerja 29
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi 29
1. Sasaran RPJMD 29
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan 21
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan 33
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian 35
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan 37
3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan 38
4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro 40
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penyusunan Program 41
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 43
5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah ... 44
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur 46
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah 47
6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA 50
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi . 52
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 53
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya 56
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan 57
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia 59
8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 61
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya 62
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur... 64

B. Akuntabilitas Keuangan 66
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020 66
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program 69
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020 72

Bab IV Penutup 84
A. Kesimpulan 84
B. Strategi Peningkatan Kinerja 85

Lampiran
1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja Bappeda selama tahun anggaran 2020.

Tahun Anggaran 2020 ini dapat dikatakan begitu banyak dinamika eksternal seperti munculnya pandemic covid-19, refocusing anggaran, terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, releasenya aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian oleh semua SKPD termasuk Bappeda. Penyesuaian-penyesuaian tersebut membuat kinerja Bappeda mau tidak mau mengalami penurunan akselerasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan baru. Menurunnya tingkat capaian baik pada kinerja fisik dan keuangan merupakan kondisi yang harus ditanggung jawabi Bappeda.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju

good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK BAPPEDA dapat dilihat pada bagan berikut :

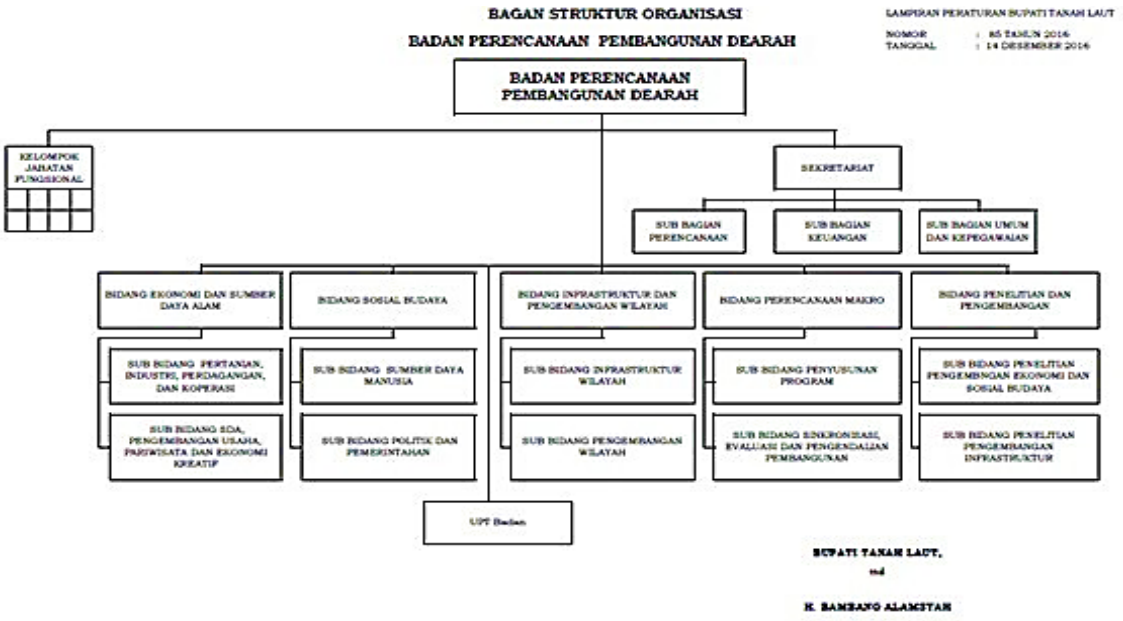

Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa Bappeda Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang kasubbag dan dibantu pula oleh 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) orang Kasubbid. Selain itu, Bappeda dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun detil numenklatur tiap jabatan yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, yang membawahi 3 orang Kasubbag yaitu :
   1) Kasubbag Perencanaan
   2) Kasubbag Keuangan
   3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Bidang Sosial Budaya, yang membawahi 2 orang Kasubbid yaitu :
   1) Kasubbid Sumber Daya Manusia
   2) Kasubbid Politik dan Pemerintahan.
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
   1) Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
   2) Kasubbid Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
   1) Kasubbid Infrastruktur Wilayah; dan
   2) Kasubbid Pengembangan Wilayah.
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
   1) Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya;
   2) Kasubbid Penelitian dan Pengembangan dan Infrastruktur.
7. Kepala Bidang Perencanaan Makro terdiri dari :
   1) Kasubbid Penyusunan Program; dan
   2) Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.

d. Pelaksanaan administrasi Badan.

e. Pembinaan UPT Badan.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detil, setiap jabatan yang ada di Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

a) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Derah;

b) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Derah;

c) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Derah;

d) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;

f) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;

g) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

h) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

i) pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata

persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;

j) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Derah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Derah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat membawahi :

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

b) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
2) memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
3) pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial Budaya;

4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten serta Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya;
6) pelaksanaan Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sosial Budaya membawahi :

1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia

   Sub Bidang Sumber Daya Manusia melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Sumber Daya Manusia.
2) Sub Bidang Politik dan Pemerintahan

   Sub Bidang Politik dan Pemerintahan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Politik dan Pemerintahan.

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah, pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
2) memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;

3) pengoordinasian, penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
5) pengoordinasian dan penyusunan materi dan substansi untuk pelaksanaan Perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
6) pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di KabupatenTanah Laut pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
8) pelaksanaan pengendalian/monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
10) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi :

1) Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangandan Koperasi

   Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan pemantauan, dan monitoring serta sinkronisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan pada lingkup subbidang pertanian, industri, perdagangan dan koperasi.

2) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan pemantauan, dan monitoring serta singkronisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan pada lingkup subbidang Sumber Daya Alam, pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Inrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2) pemverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3) pengkoordinasianpelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
6) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7) pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Penegembangan Wilayah;
8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

11) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :

1) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah

   Sub Bidang Infrastruktur Wilayah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan bidang Infrastruktur Wilayah yang meliputi urusan kecipta karyaan, bina marga, pengairan, perumahan pemukiman, perhubungan dan telekomunikasi.

2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

   Sub Bidang Pengembangan Wilayah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan ketata ruangan, lingkungan hidup dan pertanahan.

5. Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan makro pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2) pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3) penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
4) pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah;

6) pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Makro membawahi :

1) Sub Bidang Penyusunan Program

   Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka integrasi dan sinkronisasi perencanaan makro pembangunan daerah dan perencanaan pembiayaan.
2) Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sub Bidang Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan terkait Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, teknologi dan inovasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang

sosial dan budaya;

4) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
5) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6) pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Peneltian dan Pengembangan membawahi :

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya

   Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur

   Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala

sebagai bahan informasi dan evaluasi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait Kelompok Jabatan Fungsional ini terdapat ketentuan sebagai berikut :

1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dankebutuhan.
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senioryang ditunjuk oleh Kepala Badan.
5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi / permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat ada 5 (Lima) akar masalah yang sampai saat ini masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya Kualitas SDM perencana.

   Kualitas Sumber Daya Manusia yang menyusun sebuah perencanaan akan sangat menentukan kualitas perencanaan yang dihasilkan. Untuk menjadi seorang perencana tidaklah mudah. Diperlukan pemahaman terhadap agenda besar yang diinginkan oleh Pemerintah daerah. Agenda besar tersebut adalah RPJMD. Didalamnya telah dituangkan seluruh target capaian yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 Tahun. Adaya tujuan, sasaran, indikator dan target harus betul betul difahami oleh para perencana baik pada SKPD Bappeda sendiri ataupun olehpara perencana yang ada di SKPD. Secara mendasar Bappeda memiliki cukup ketergantungan dengan para perencana di SKPD karena semua arahan dan pengendalian yang disampaikan harus diejawantahkan oleh para perencana SKPD kedalam indikator-indikator sasaran yang termuat dalam Renstra dan Renja. Sinkronisasi antara Bappeda dan para perencana SKPD inilah yang diperlukan untuk melahirkan sebuah perencanaan yang berkualitas, yaitu perencanaan yang selaras dengan RPJMD.

   Sudah menjadi masalah klasik bahwa penempatan para ASN perencana di SKPD seringkali berubah dari waktu ke waktu. Perencana yang awalnya sudah mulai memahami tugas dan kewajibannya seringkali kemudian mengalami perpindahan tugas apakah karena mutasi ataupun promosi jabatan sehingga akan datang para perencana baru yang belum memiliki kemampuan dan pemahaman sebagaimana perencana sebelumnya. Hal ini salah satu sebab mengapa pembinaan keperencanaan Bappeda kepada para perencana di SKPD senantiasa mengalami pasang surut. Kondisi ini menyebabkan penyusunan perencanaan setiap tahun seringkali pula terpengaruh dengan penggantian posisi seorang perencana di SKPD, disamping memang secara alami selalu ada perbedaan kualitas keterampilan dari setiap perencana.

2. Belum dijadikannya Musrenbang sebagai pintu masuk utama penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

   Musrenbang semestinya merupakan sarana yang sangat tepat untuk langkah awal menyusun perencanaan setiap tahunnya. Dalam mekanisme

musrenbang ini sebenarnya sudah terakomodasi berbagai pendekatan yang memungkinkan disusunnya perencanaan secara matang. Dalam musrenbang terdapat mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planing), mekanisme perencanaan dari atas (top down planning), mekanisme perencanaan teknokratis, dan mekanisme politis. Pada mekanisme bottom up, masyarakat mempunyai jalur untuk menyampaikan aspirasinya, keinginannya yang memang telah dibicarakan pada tingkat desa saat dilaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kecamatan. Pada mekanisme top down, Pemerintah dan SKPD mempunyai jalur untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah dan pemerintah diatasnya. Pada mekanisme teknokratis, Para cendekiawan dan publik dapat menyampaikan usulan yang relatif telah matang dipandang dari sudut pandang teknis perencanaannya. Pada Mekanisme politis, para wakil rakyat memiliki pintu masuk untuk menyampaikan keinginan para konstituennya. Semua sudah memiliki pintu masuk melalui musrenbang pada beberapa tingkatannya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak usulan masyarakat yg hilang entah kemana padahal telah tersaring secara baik di level desa dan kecamatan. Padahal sebenarnya masyarakatlah yang tahu dengan kondisi dilevel akar rumput. Kadang terjadi ego sektoral sehingga justru perencanaan top planning lebih dominan dan mekanisme politik juga tak kalah meramaikan riuhnya pembahasan usulan kegiatan. Adanya usulan masyarakat yang langsung ke SKPD, langsung ke pimpinan daerah, atau ke wakil rakyat menambah rumitnya penyusunan perencanaan. Bappeda menjadi pihak yang disalahkan masyarakat karena dinilai tak mampu menjaga kontinyuitas usulan masyarakat sehingga pameo bahwa “Musrenbang hanya formalitas dan tidak ada gunanya” dimata masyarakat menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Ketika ini terjadi, kembali Bappeda yang harus babak belur menerima semua yang dikeluhkan semua pihak.

3. Belum optimalnya pengendalian dalam penyusunan perencanaan.

   Dalam prakteknya, penyusunan perencanaan melalui berbagai tahap, dari perencanaan awal dimana SKPD diasistensi renjanya dan kemudian diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan. Setelah pagu disampaikan maka

kembali dilakukan rasionalisasi usulan oleh masing-masing SKPD. Hasil rasionalisasi tadi kemudian diinput kedalam SIPD. Sayangnya setelah proses input selesai seringkali terjadi pengendalian menjadi sulit dilakukan karena biasanya batas waktu penginputan yang sangat terbatas dan terkesan kejar tayang. Ada beberapa titik krusial dimana pengendalian sebenarnya bisa dilakukan tetapi menjadi tidak dapat dilakukan oleh Bappeda. Titik pertama berada pada saat renja sudah diasistensi dan perencanaan awal berupa kegiatan disusun. Bappeda tidak dapat menjamin bahwa hasil asistensi dipatuhi oleh SKPD. Titik kedua terjadi pada saat kegiatan sudah disusun oleh SKPD sesuai pagu tentatif. Saat inipun Bappeda tidak memiliki mekanisme pengendalian untuk menjamin bahwa usulan kegiatan berdasarkan pagu masih sesuai dengan renja yang sudah diasistensi Bappeda. Titik ketiga terjadi pada saat penginputan. Kembali Bappeda tidak memiliki mekanisme bahwa apa yang diinput oleh SKPD adalah sesuai kesepakatan saat asistensi. Mungkin tidak semua titik krusial bisa terbaca oleh Bappeda, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui ketidakpatuhan terhadap hasil asistensi. Salah satunya dengan mengusulkan kegiatan yang kurang penting dan kemudian mengusulkan penambahan anggaran melalui Telaahan Staf yang kemudian berkembang secara liar hingga pembengkakan anggaran melambung melebihi proyeksi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Fenomena yang nampak kemudian adalah RKPD tidak sesuai lagi dengan KUPA-PPAS. Ada banyak tambahan kegiatan yang tidak diketahui asal muasalnya dan SKPD terkesan menjadikan Telaahan Staf kepada Pimpinan Daerah sebagai jalan keluar untuk mewujudkan keinginan. Keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan.

4. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.

   Hal mendasar yang menyebabkan perencanaan menjadi tidak berkualitas karena tidak selaras dengan Agenda Besar 5 Tahunan Pemerintah Daerah yaitu RPJMD. Masih terdapat belasan SKPD yang belum sinkron Renstranya dengan RPJMD dan masih terdapat 17 sasaran RPJMD yang masih belum tercapai hingga memasuki tahun ketiga RPJMD 2018-2023. Apabila hal ini tidak segera diluruskan maka dampak yang muncul adalah

tidak sinkronnya kegiatan SKPD dengan Tujuan dan Target Pemerintah Daerah yang secara jelas telah dituangkan dalam RPJMD. Anggaran menjadi percuma digelontorkan karena membiayai berbagai kegiatan yang kontennya tidak selaras dengan keinginan RPJMD. Menselaraskan renstra dan Renja SKPD dengan Sasaran-saran dan target RPJMD menjadi hal yang harus segera dilakukan oleh Bappeda Tanah Laut.

5. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

   Seiring dengan perkembangan waktu, kabupaten Tanah Laut yang dulu pernah jaya dengan kayu ulinnya, kemudian terganti dengan batubara dan biji besi kini terasa belum terpetakan kemana akan terbawa arahnya apabila sawit dan karet dan jagung dan komoditi lainnya juga akan mengalami penurunan produksi. Pemerintah perlu segera mencari alternatif pendapatan untuk mempersiapkan perkembangan di masa mendatang. Tidak hanya terkait dengan alternatif potensi, kondisi alam yang seringkali tak bersahabat di musim hujan juga memiliki potensi untuk menurunkan kesejateraan masyarakat. Karena itu, adanya pemikiran, penelitian dan pengembangan menjadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi sesuatu ancaman ataupun memanfaatkan sebuah peluang. Dengan penelitian dan pengembangan maka kesalahan langkah akan dapat dihindarkan. Dengan penelitian dan pengembangan akan membuka peluang yang bisa jadi belum terpikirkan. Selain apa yang dikemukakan diatas, tupoksi Bappeda dalam melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan menghajatkan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan mesti diberikan porsi yang besar. Saat ini masih dirasakan bahwa peran penelitian dan pengembangan belum tergali secara optimal. Untuk itu perhatian terhadap rogram penelitian dan pengembangan perlu lebih dioptimalkan lagi. Dengan kualitas penelitian yang baik akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di di Tanah Laut di masa yang akan datang.

Dari beberapa permasalahan diatas, Bappeda memandang perlu untuk

mengangkat 2 (dua) isu strategis saat ini, yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

D. Produk dan Layanan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Bab II Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa Produk Layanan Bappeda meliputi:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ;
4. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Dokumen-dokumen Hasil Kajian.

E. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
C. Isu Strategis
D. Produk dan Layanan
E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD
B. Misi RPJMD
C. Tujuan dan Sasaran Strategis
D. Indikator Kinerja Utama
E. Perjanjian Kinerja
F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
    1. Sasaran RPJMD
    2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan
    3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan
        1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
        2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan
        3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan
    4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro
        1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penyusunan Program
        2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
    5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
        1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur
        2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah
    6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
        1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi
        2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya
        1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan
        2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia
    8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN
1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 adalah : "Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi" yang merupakan akronim dari Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi".

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah dirancanglah 5 buah Misi yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan penacapaian misi ke-3 yaitu : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)".

Tata kelola pemerintahan yang baik berawal dari penyusunan perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang baik dapat diukur dari beberapa aspek yang seringkali disingkat "SMART" yaitu Specific (khusus/focus), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai) dan Timebound (Batas Waktu).

Sejauh mana Bappeda mampu menjadi SKPD leading sektor perencanaan semua SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut akan menentukan kualitas perencanaan yang akan tersusun. Tersusunnya perencananaan yang berkualitas akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan karena dalam prosesnya, tata kelola pemerintahan memerlukan perencanaan yang baik pula.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Rumusan tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah.

Kualitas perencaaan yang baik akan sangat menentukan kualitas pembangunan yang dihasilkan. Kualitas perencanaan dan pembangunan yang baik ini akan dapat didorong secara optimal apabila didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula. Untuk itu, guna mewujudkan pembangunan yang baik sesuai arahan RPJMD diperlukan kualitas perencanaan yang baik yang didukung denga kualitas kelitbangan yang baik pula.

2. Sasaran Strategis

1) Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan atau kesesuaian antara perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan SKPD dengan sasaran-sasaran yang ada di dalam RPJMD. Sasaran ini juga mengarah pada kesesuaian program RKPD dengan RPJMD. Indikatornya dilihat dari jumlah program yang ada di RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan program perencanaan dan kelitbangan yang ada di RPJMD.

2) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup bidang Sosial Budaya dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisas antara Bidang Sosial Budaya dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi bidang Sosial Budaya.

3) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisas antara Bidang Ekonomi dan SDA dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Ekonomi dan SDA.

4) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisas antara Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui sumbangsih hasil kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam penyempurnaan penyusunan perencanaan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SKPD baik secara administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi

keuangan serta penyusuanan perencanaan dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga mencapai akuntabilitas yang baik yang diukur dengan Nilai SAKIP SKPD.

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100 %	Meningkatkan keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan RPJMD	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.	Peningkatan kualitas perencana pembangunan daerah.
			Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Meningkatkan Pengendalian evaluasi Kinerja SKPD lingkup Kabupaten.	Peningkatan koordinasi dengan SKPD se Kabupaten.
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya.
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Ekonomi dan SDA.

			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Meningkatkan kualitas perencanaan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Mempertajam indikator sasaran kegiatan SKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.	Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan, pelaporan dan keuangan SKPD	Meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan SKPD
	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan.	100 %	Meningkatnya implementasi hasil penelitian Pembangunan Daerah.	Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan order dari pimpinan daerah kepada sebuah SKPD. IKU merupakan locator dimana SKPD tersebut harus berkiprah dan memberikan andilnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dari IKU ini pula dapat diketahui core bussines sebuah SKPD. Berdasarkan analisa terhadap tuntutan kinerja yang dikaitkan dengan produk layanan Bappeda maka untuk tahun 2020 telah ditetapkan adanya 1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tanah Laut yaitu :

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah”.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sertasumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka Bappeda juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2020. Perjanjian Kinerja ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatangan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, Bappeda juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub bagian/bidang (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD BAPPEDA adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan kelitbangan	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah.**	Persentase Perencanaan RKPD yang sesuai dengan RPJMD.

	daerah.	Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan.	100	**Program Penelitian dan Pengembangan**	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian SKPD. 2. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun. 3. Persentase Laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan. 4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	100 100 100 Nilai SAKIP A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
				Penyediaan Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan perlengkapan Perkantoran.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD.	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja Sumber Daya Manusia.
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

				Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Persentase penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
				Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renstra dan Renja SKPD.
				Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penyusunan laporan keuangan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
3	Meningkatnya Keselarasan perencanaan dan Pengendalian program SKPD dengan RPJMD.	1. Persentase Keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap program yang ada di RPJMD 2. Persentase program yang memenuhi target	100 100	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah.**	Jumlah program SKPD yang memenuhi target
				Penyusunan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan
				Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Jumlah rapat monev per triwulan (4 kali rapat).
					Jumlah rapat koordinasi DAK dan

					dokumen usulan DAK.
				Review RPJMD	Jumlah Dokumen Review RPJMD.
				Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
4	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya.	100	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
				Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
			100	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
5	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Ekonomi dan SDA.	100	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA**	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.
			100	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan	100	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah**	Persentase serapan anggaran dan kinerja fisik program.

		Pengembangan Wilayah dengan RKPD. 2. Persentase meningkatnya capaian kinerja SKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
7.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian bidang perencanaan yang diwujudkan.	100	**Program Penelitian & Pengembangan**.	Persentase Hasil Penelitian yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan.
				Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.
				Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	Persentase penyerapan anggaran dan kinerja fisik kegiatan.

F. Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	987.237.784,-
1	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	255.954.295,-
2	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	404.506.689,-
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	326.776.800,-
2	**Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	396.702.400,-
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	170.943.000,-
3	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	382.924.600,-
4	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	15.000.000,-
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,-
3	**Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD**	45.000.000,-

	1	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-
	2	Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	25.000.000,-
4	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD**		23.967.600,-
	1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	8.668.700,-
	2	Penyusunan laporan keuangan	9.134.200,-
	3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	6.164.700,-
5	**Program Penelitian dan Pengembangan**		289.537.500,-
	1	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	46.077.500,-
	2	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.460.000,-
6	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah**		131.209.400,-
	1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	46.051.900,-
	2	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	85.157.500,-
7	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**		915.298.280,-
	1	Penyusunan RKPD	673.628.100,-
	2	Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	84.806.000,-
	3	Review RPJMD	194.625.880,-
	4	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	3.238.300,-
8	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA**		76.872.880,-
	1	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	42.355.000,-
	2	Perencanaan Pemabangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34.517.880,-
9	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**		92.915.000,-
	1	Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	49.021.000,-
	2	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	24.000.000,-
	3	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	19.894.000,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Bappeda Tanah Laut melaksanakan 9 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp987.237.784,-. Anggaran ini adalah anggaran pada APBD Perubahan setelah sebelumnya mengalami pemangkasan

saat dilakukannya refocusing anggaran terkait perlunya pemusatan anggaran untuk penanganan Covid 19.

Dari 26 kegiatan yang ada, terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tidak jadi dilaksanakan karena terpangkas anggarannya terkena refocusing. Dua kegiatan yang lain adalah Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan dengan dana sebesar Rp20.000.000,- disebabkan ditiadakannya acara pameran pembangunan dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanah Laut akibat adanya pandemi covid-19, dan kegiatan Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,- yang disebabkan adanya pertimbangan bahwa kurang maksimal manfaatnya apabila dilaksanakan.

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

RPJMD merupakan buku suci dari semua SKPD yang didalamnya terdapat indikator-indikator yang harus diwujudkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya. Sasaran RPJMD yang menjadi core bussines BAPPEDA sebagaiman tercantum dalam RPJMD adalah adalah "**Meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten dengan target memperoleh nilai BB"**. Sampai dengan tahun 2020, nilai SAKIP BB ini belum tercapai dan masih dalam katagori nila B sehingga tugas bagi BAPPEDA untuk berperan dalam mencapai peningkatan nilai SAKIP ini menuju nilai BB. Perlu dikatahui bahwa indikator sasaran nilai SAKIP BB ini bukan hanya diampu oleh BAPPEDA sendiri tetapi melibatkan 2 SKPD lainnya yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka mewujudkan peran BAPPEDA dalam meningkatkan nilai SAKIP kabupaten tersebut BAPPEDA melakukan beberapa upaya yang erat kaitannya dengan tupoksi BAPPEDA di bidang Perencanaan. Untuk itu BAPPEDA menetapkan 6 sasaran yaitu :

1) Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Keselarasan antara perencanaan dan Pengendalian program SKPD dengan RPJMD ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Bagaimana mungkin sasaran di RPJMD terkait urusan perencanaan dan kelitbangan daerah dapat diwujudkan apabila tidak terdapat keselarasan dengan perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan oleh SKPD oleh Bappeda. Harus terdapat benang merah yang nantinya akan menjadi indikator bagi bahwa semua program yang dilaksanakan di SKPD memang telah selaras atau sesuai denga amanah RPJMD yang telah dijabarkan lebih detil pada Renstra dan Renja SKPD. Sasaran ini menjadi Kinerja Utama pada Bidang Perencanaan Makro Bappeda

Tanah Laut.

2) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

   Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Kinerja Utama yang harus dilaksanakan oleh 3 Bidang pada Bappeda yaitu Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan SDA serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Simpul dari ketiga bidang ini merupakan konsekwensi logis dari pelaksanaan Permendagri 90 Tahun 2019 yang ditindaklanjuti dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengamanahkan bahwa Indikator pada beberapa sub kegiatan hanya diwadahi dalam 1 Indikator Kegiatan, sehingga baik bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi & SDA maupun Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terikat pada 1 Kinerja saja yaitu Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Ketiga Bidang tersebut hanya berbeda pada penggarapan bidangnya saja sesuai tupoksinya.

3) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA.

   Sama dengan uraian tersebut pada nomor 2 diatas, kinerja utama dari bidang Ekonomi dan SDA mempunyai peran untuk Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah khusus pada bidang Ekonomi dan SDA.

4) Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

   Sasaran ini merupakan kinerja utama dari bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam upaya untuk Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

   Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan pengembangan akan menghasilkan kajian-kajian yang sangat berguna bagi penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas dan dapat

memberi kontribusi bagi dikuranginya kesalahan dalam penyusunan perencanaan. Penelitian dan Pengembangan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sasaran ini menjadi kinerja utama Sekretariat Bappeda. Indikator dari pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD ini dapat dilihat dari peningkatan nilai SAKIP SKPD. Upaya utama yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD yang akurat dan tepat waktu. Selain itu juga ditunjang oleh berbagai program kesekretariatan yang menjamin berjalannya pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan kelancaran aktivitas perkantoran lainya secara baik dan efisien.

Sebelum memasuki pada uraian secara detil tentang akuntabilitas kinerja personil Bappeda dari Eselon II hingga eselon IV perlu disepakati terlebih dahulu tentang katagori penilaian berdasarkan skala yang dapat dipertanggungjawabkan. Skala penilaian yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja personil Bappeda menggunakan skala yang diambil dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Dengan menggunakan skala ini diharapkan penilaian mandiri yang dilakukan menjadi lebih objektif dan lebih jelas pengklasifikasiannya.

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan.

Akuntabilitas Kepala Bappeda dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Demikian juga halnya dengan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretaris dan para Kepala Bidang. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

Kepala Bappeda mengampu 9 Program untuk mewujudkan sasaran strategis Bappeda yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah. Adapun Program-program yang diampu oleh Kepala Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase perencanaan yang sesuai dengan RPJMD.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	915.298.280,-	445.775.400,-	100	48,70
			Program Perencanaan Sosial Budaya	92.915.000,-	42.531.600,-	100	45,77
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	76.872.880,-	34.484.500,-	100	44,86
			Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	131.209.400,-	76.942.800,-	100	58,64
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	987.237.784,-	917.209.510,-	100	92,91
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasaran	965.570.000,-	867.045.750,-	100	89,80

			a Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia.				
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD.	45.000.000,-	0	100	0
			Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja SKPD	23.967.600,-	19.520.700,-	100	81,45
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	**Program Penelitian dan Pengembangan**	289.537.500,-	143.787.600,-	100	49,66

Berdasarkan tabel diatas, Akuntabilitas Kinerja Kepala Bappeda dapat dilihat dari serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan dari 9 Program yang dilaksanakan. Dari 9 Program tersebut terdapat 1 program yang tidak dilaksanakan yaitu program Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD yang kegiatannya memang dibatalkan akibat adanya covid-19 dan pertimbangan efisiensi utnuk tidak dilaksanakan. Dengan mengabaikan 1 program yang tidak dilaksakanan ini maka apabila dirata-ratakan serapan angaran yang berhasil dicapai adalah 74,64% dari target 100 persen yang dimuat dalam perjanjian kinerja.

Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik kegiatan maka data realisasifisik yang dicapai menunjukkan semua program kegiatan mencapai 95,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target fisik kegiatan dapat tercapai meskipun dana yang terserap hanya berkisar 74,64%. Penyerapan anggaran yang lebih kecil dibanding realisasi fisik ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi pandemi yang masih berlangsung di tahun 2020. Dengan kondisi pandemi yang terjadi, banyak rapat-rapat kordinasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan rapat secara daring (dalam jaringan) atau secara online. Akibatnya, anggaran makan minum, narasumber, ATK, tidak dapat direalisasikan. Belum lagi

banyaknya kegiatan perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah yang tidak dilakukan sehingga berimbas pada tidak terserapnya anggaran secara maksimal. Meskipun demikian, secara kinerja fisik, semua target fisik dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, terjadi efisiensi anggaran, dimana biaya yang semestinya dikeluarkan bisa tidak perlu dikeluarkan, namun hasil yang ingin dicapai tetap dapat diperoleh. Dengan demikian, berdasarkan skala yang sudah disampaikan diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda Tanah Laut dilihat dari sisi serapan anggaran dapat dikatakan berkatagori SEDANG, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi realisasi fisik kegiatan.

3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan.

Sekretaris Bappeda mengampu 4 Program untuk mewujudkan sasaran Kinerja Sekretaris Bappeda yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun Program-program yang diampu oleh Sekretaris Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD.	Nilai SAKIP A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	987.237.784,-	917.209.510,-	100	92,91
			Penyediaan Rapat-Rapat konsultasi dan Koordinasi.	404.506.689,-	389.806.173,-	100	96,37
			Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.	255.954.295,-	204.509.871,-	100	79,90
			Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD.	326.776.800,-	322.893.466,-	100	98,81
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber	965.570.000,-	867.045.750,-	100	89,80

			Daya Manusia				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	396.702.400,-	373.980.000,-	100	94,27
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	170.943.000,-	108.516.750,-	100	63,48
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	382.924.600,-	374.049.000,-	100	97,68
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	15.000.000,-	10.000.000,-	100	70
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,-	0	0	0
			Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	45.000.000,-	0	0	0
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-	0	0	0
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	25.000.000,-	0	0	0
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23.967.600,-	19.520.700,-	100	81,45
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	8.668.700,-	6.296.800,-	100	72,64
			Penyusunan laporan keuangan	9.134.200,-	7.538.900,-	100	82,53
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	6.164.700,-	5.685.000,-	100	92,22

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretaris Bappeda mengampu 4 program dengan 1 program yang tidak dilaksanakan yaitu Program Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD yang berisikan kegiatan pameran pembangunan dan kegiatan Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD. Jika dirata-ratakan dengan mengabaikan program yang tidak dilaksanakan tersebut maka serapan anggaran dari 3 program tersebut mencapai 88,05% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja.Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dari angka 88,05 ini maka akuntabilitas kinerja Sekretaris Bappeda berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan berkatagori TINGGI, dari sisi serapan anggaran, dan berkatagori SANGAT TINGGI pula dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan.

4) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD.	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**				
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	404.506.689,-	389.806.173,-	100 12 Bulan	96,37 12 Bulan
			Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.	255.954.295,-	204.509.871,-	100 12 Bulan	79,90 12 Bulan
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	326.776.800,-	322.893.466,-	100 14 orang	98,81 14 orang

2.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	**Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia**				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	170.943.000,-	108.516.750,-	100 4 unit Mobil Dinas 13 Unit Sepeda Motor Dinas dan Surat-suratnya Perawatan perlengkapan kantor selama 1 tahun	63,48 4 unit Mobil Dinas 13 Unit Sepeda Motor Dinas dan Surat-suratnya Perawatan perlengkapan kantor selama 1 tahun
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	15.000.000,-	10.000.000,-	100 4 orang ASN	70 3 Orang ASN

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian mengampu 5 Kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD, dan Kinerja Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	404.506.689,-	389.806.173,-	100 12 Bulan	96,37 12 Bulan
2.	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran.	255.954.295,-	204.509.871,-	100 12 Bulan	79,90 12 Bulan

3.	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	326.776.800,-	322.893.466,-	100 14 orang	98,81 14 orang
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	170.943.000,-	108.516.750,-	100 4 unit Mobil Dinas 13 Unit Sepeda Motor Dinas dan Surat-suratnya Perawatan perlengkapan kantor selama 1 tahun	63,48 4 unit Mobil Dinas 13 Unit Sepeda Motor Dinas dan Surat-suratnya Perawatan perlengkapan kantor selama 1 tahun
5.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	15.000.000,-	10.000.000,-	100 4 orang ASN	70 3 Orang ASN

1. Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 404.506.689,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 389.806.173,- (96,37%), kegiatan ini merupakan perjalanan dinas luar dan dalam daerah, penyediaan rapat-rapat, serta makan dan minum tamu. Dalam pelaksanaannya (fisik) dapat terealisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran pada tahun 2020 memiliki pagu sebesar Rp. 255.954.295 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.509.871,- (79,90%), kegiatan ini mengakomodir penyediaan alat tulis kantor, bahan pembersih dan alat kelengkapan kantor lainnya.
3. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD merupakan kegiatan yang rincian belanjanya mengakomodir gaji/honor Pegawai Tidak Tetap.
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran merupakan kegiatan yang mengakomodir pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua), genset, printer, PC, laptop, AC, serta peralatan kelistrikan.
5. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur pada tahun 2020 mengalami refocusing anggaran dan pada akhirnya tidak dapat terealisasi sepenuhanya dikarena adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Umum dan kepegawaian berjumlah Rp1.173.180.784,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp1.035.726.260,- atau sekitar 88,28%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

5) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan

Akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun. 2. Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD yang tersusun.	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD**				
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	8.668.700,-	6.296.800,-	100 6 Dokumen	72,64 6 Dokumen (100%)
			Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	6.164.700,-	5.685.000,-	100 5 Laporan	92,22 5 Laporan (100%)
	Melaksanakan penyebaran informasi pembangunan SKPD.	Jumlah Partisipasi kegiatan Pameran Pembangunan.	**Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD**				
			Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-	0	0	0
		Jumlah pembuatan/ pemeliharaan	**Program Penyebarluasan Informasi**				

		website/ aplikasi internal.	**Pembangunan dan Pelayanan SKPD**				
			Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	25.000.000,-	0	0	0
			Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasaran a Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia				
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	382.924.600,-	374.049.000,-	100 12 Bulan	97,68 12 Bulan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Perencanaan mengampu 5 Kegiatan yang terdiri atas 2 kegiatan tupoksi jabatan dan 3 kegiatan tugas tambahan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan dengan indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dan Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD yang tersusun. Dari 5 kegiatan tersebut terdapat 2 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan dan kegiatan Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Perecanaan pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	8.668.700	6.296.800	100 6 Dokumen	72,64 6 Dokumen (100%)
2.	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-	0	0	0
3.	Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	25.000.000,-	0	0	0
4.	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	382.924.600,-	374.049.000,-	100 12 Bulan	97,68 12 Bulan

1. Kegiatan Penyusunan Perecanaan dan Kinerja SKPD pada tahun 2020 pagu anggaran sebesar Rp. 8.668.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.296.800,- (72,64%). Adapun target yang direncanakan adalah 100%, 6 dokumen yang dimaksud meliputi dokumen Renja Perubahan 2020, Dokumen PK 2020, Dokumen PK Perubahan 2020, Dokumen RKA-P 2020, Dokumen RKA 2021 dan Dokumen DPA 2021. Dalam pelaksanaannya penyusunan dokumen (fisik) dapat terealisasi sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan tidak terealisasi dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
3. Kegiatan Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi tidak terealisasi dikarenakan pada tahun tahun 2021 direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan Poli Teknik Negeri Tanah laut.
4. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor pada tahun 2020 pagu sebesar Rp. 382.924.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 374.049.000,- (97.68%). Adapun rincian dari kegiatan ini adalah rehab parkir, pengecatan gedung kantor dan pagar, rehab aula, rehab atap/rumah genset dan rehab halaman. Dalam kegiatan ini juga terealisasi secara fisik sebesar 100%.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Perencanaan berjumlah Rp442.758.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp386.030.800,- atau sekitar 87,19%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

6) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan

Akuntabilitas kinerja Kasubbag keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD**				
			Penyusunan laporan keuangan	9.134.200,-	7.538.900,-	100 6 buah laporan keuangan	82,53 6 buah laporan keuangan (100%)
			Pelayanan Administrasi Perkantoran				
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	255.954.295,-	204.509.871,-	100 12 Bulan	79,90 12 Bulan
			Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	396.702.400,-	373.980.000,-	100 3 buah Laptop 6 Buah peralatan Kantor (Printer, HDD Eksternal, Projector) 1 set Peralatan gedung kantor (mebelair) 1 buah TV 1 Set Gordyn dan 1 set	94,27 3 buah Laptop 6 Buah peralatan Kantor (Printer, HDD Eksternal, Projector) 1 set Peralatan gedung kantor (mebelair) 1 buah TV 1 Set Gordyn dan 1 set

						Jaringan internet 1 Video tron dan 1 Display Baliho	Jaringan internet 1 Video tron dan 1 Display Baliho
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,-	0	0	0

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Keuangan mengampu 4 Kegiatan yang terdiri atas 1 kegiatan tupoksi jabatan dan 3 kegiatan tugas tambahan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan. Dari 4 kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya disebabkan angarannya terkena refocusing anggaran terkait dengan pandemi covid-19.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Keuangan pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penyusunan laporan keuangan	9.134.200,-	7.538.900,-	100 6 buah laporan keuangan	82,53 6 buah laporan keuangan (100%)
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,-	0	0	0

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.134.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.538.900,- (82,53%). Realisasi 6 laporan meliputi Laporan Keuangan Akhir Tahun (Calk), Laporan Keuangan Bulan (Bendahara Pengeluaran), Laporan Keuangan Tahunan (Bendahara Pengeluaran), Laporan keuangan Triwulan & Semesteran, Laporan Pajak Bulanan serta Laporan Pajak Triwulan/Semesteran dan Tahunan. Dalam kegiatan ini telah terealisasi secara fisik sebesar 100%.

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya tidak dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran covid-19.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Keuangan berjumlah Rp661.790.895,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp586.028.771,- atau sekitar 88,55%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Keuangan dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro.

Kepala Bidang Perencanaan Makro mengampu 1 Program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan sasaran Kinerjanya yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp915.298.280,-. Terkait realisasi dari program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.	1. Persentase Keselarasan Program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang di ada RPJMD. 2. Persentase program yang memenuhi	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah.**	915.298.280,-	445.775.400,-	100	48,70
			Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	84.806.000,-	51.186.800,-	100	60,36
			Review RPJMD	194.625.880,-	27.119.600,-	100	13,93
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	3.238.300,-	2.286.000,-	100	70,59

		Target.	Penyusunan RKPD	632.628.100,-	365.183.000,-	100	57,72

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang diberhasil direalisasikan adalah sebesar Rp445.775.400,- atau sekitar 48,70% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dari angka 48,70 ini maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan hanya berkatagori SANGAT RENDAH, dari sisi serapan anggaran, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan karena realisasi fisiknya mencapai 100%.

3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penyusunan Program

Akuntabilitas kinerja Kasubbid Penyusunan Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan fasilitasi perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah.**				
			Penyusunan RKPD	632.628.100,-	365.183.000,-	100 1 Dok	57,72 1 Dok (100%)
			Review RPJMD	194.625.880,-	27.119.600,-	100 1 Dok Review RPJMD	13,93 1 Dok Review RPJMD (100%)
			Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	3.238.300,-	2.286.000,-	100 1 Dok	70,59 1 Dok (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Penyusunan Program mengampu 3 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa

Melaksanakan fasilitasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penyusunan Program pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penyusunan RKPD	632.628.100,-	365.183.000,-	100 1 Dok	57,72 1 Dok (100%)
2.	Review RPJMD	194.625.880,-	27.119.600,-	100 1 Dok Review RPJMD	13,93 1 Dok Review RPJMD (100%)
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	3.238.300,-	2.286.000,-	100 1 Dok	70,59 1 Dok (100%)

1. Kegiatan Penyusunan RKPD pagu anggaran sebesar Rp. 632.628.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.183.000,- (57,72). Realisasi 1 Dokumen yaitu RKPD 2021 & RKPD Perubahan 2020. Dalam kegiatan ini telah terealisasi secara fisik sebesar 100% dari target 100%.

Realisasi anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya anggaran yang tidak direalisasikan yaitu honorarium narasumber penyusunan RKPD, sewa gedung pertemuan, rapat penyusunan RKPD dan perjalanan dinas narasumber;

2. Kegiatan Review RPJMD pada tahun 2020 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 194.625.880 dan terserap sebesar Rp. 27.119.600,- (13,93%) serta realisasi fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini tidak terserap maksimal dikarena adanya anggaran belanja seperti honorarium narasumber, perjalanan dinas narsumber serta sebagian rapat yang tidak dilaksanakan.

3. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah pada tahun 2020 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 3.228.300,- dan terealisasi Rp. 2.286.000,- (70,59%) serta realisasi fisik sebesar 100%.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Penyusunan Program berjumlah Rp830.492.280,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp394.588.600,- atau sekitar 47,51%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Penyusunan Program dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Kasubbid Penyusunan Program diberi tugas tambahan untuk melakukan pembinaan terhadap 3 SKPD yaitu Inspektorat, SETWAN dan BAPPEDA. Terkait dengan capaian ketiga SKPD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	Inspektorat	83,1	83,8	Tinggi
2	Sekretariat DPRD	63,5	85,3	Rendah
3	Bappeda	74,6	95,8	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Penyusunan Program terllihat berkatagori Tinggi, Sedang dan Rendah. Hal ini sebagai salah satu gambaran hasil fasilitasi dari Kasubbid Infrastruktur terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut masih perlu ditingkatkan lagi.

4) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Akuntabilitas kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan fasilitasi DAK.	Jumlah dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah** Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	84.806.000,-	51.186.800,-	100 1 Dok	60,36 1 Dok (100%)
	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah					

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan fasilitasi DAK dengan indikator Kinerja Jumlah dokumen Monitoring Pelaksanaan Dana DAK, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi berkala Pembangunan Daerah.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penyusunan Program pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	84.806.000,-	51.186.800,-	100 1 Dok	60,36 1 Dok (100%)

Kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 84.806.000,- dan realisasi

anggaran sebesar Rp. 51.186.800,- (60,36%) serta terealisasi secara fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir aplikasi emonev dan monev serapan anggaran SKPD.

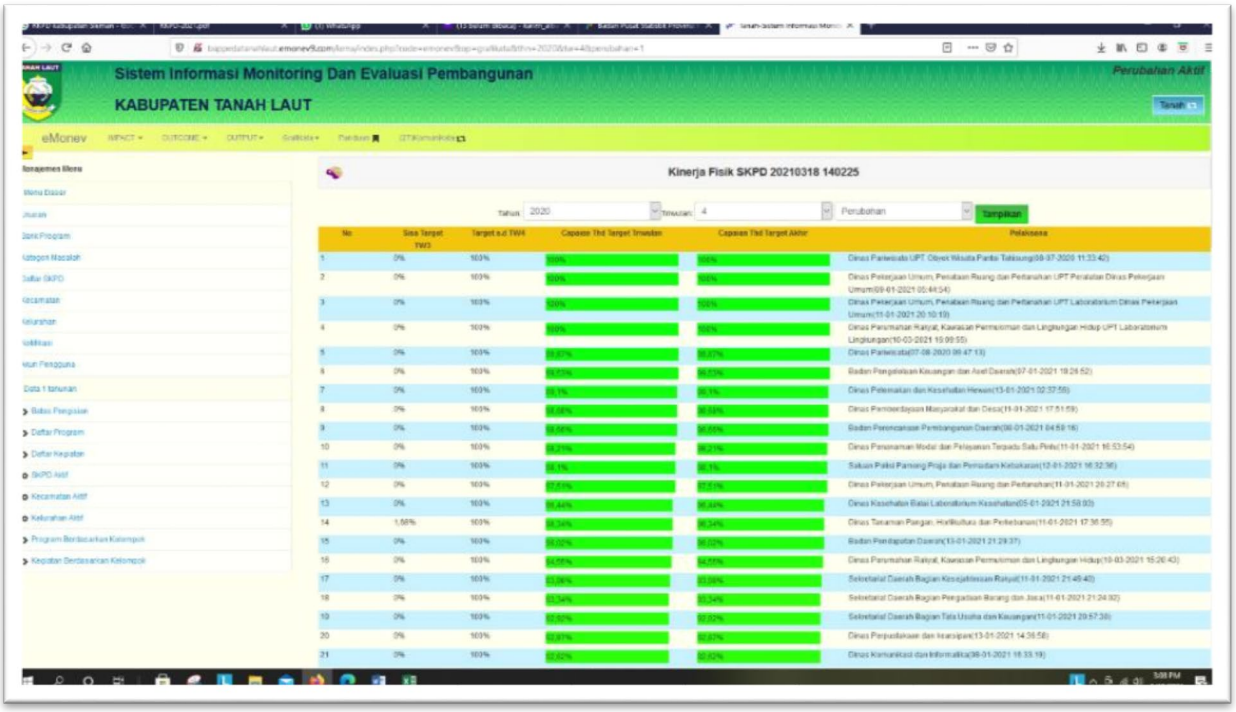

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan berjumlah Rp84.806.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp51.186.800,- atau sekitar 60,36%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Terkait dengan capaian kinerja atau akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD. 2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah**	131.209.400,-	76.942.800,-	100	58,64
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	46.051.900,-	26.487.500,-	100	57,52
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	85.157.500,-	50.455.300,-	100	59,25

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengampu 1 program yaitu **Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah untuk mencapai sasaran kinerja** Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase

Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah ini dialokasikan anggaran sebesar 131.209.400,- dan berhasil direslisasikan sebesar 76.942.800,- atau sekitar 58,64%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH dikarenakan adanya pergantian pejabat (Kepala Bidang Infrastruktur, Kasubbid. Infrastruktur Wilayah dan Kasubbid. Pengembangan Wilayah) dan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Infrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur.	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah** Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	85.157.500,-	50.455.300,-	100 1 Dok RAD AMPL	59,25 1 Dok RAD AMPL

2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur				1 Dok RP2KPKP Monev di 6 Kecamatan 7 kali rapat Pokja PPAS	1 Dok RP2KPKP (100%) Monev di 6 Kecamatan (100%) 7 kali rapat Pokja PPAS (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Infrastruktur mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Infrastruktur dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur. dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Infrastruktur Wilayah pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasakan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	85.157.500,-	50.455.300,-	100 1 Dok RAD AMPL 1 Dok RP2KPKP Monev di 6 Kecamatan 7 kali rapat Pokja PPAS	59,25 1 Dok RAD AMPL 1 Dok RP2KPKP Monev di 6 Kecamatan 7 kali rapat Pokja PPAS

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 85.157.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.455.300,- (59,25%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat mengkoordinatori kegiatan

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Tanah Laut, Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS), akan tetapi dalam perjalanannya dikarenakan adanya pandemi covid-19 kegiatan diatas tidak maksimal dilaksanakan dan terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan untuk memantau pembangunan di bidang infrastruktur, adapun kegiatan monitoring dan evaluasi yang dimaksud adalah :

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Infrastruktur berjumlah Rp85.157.500,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp50.455.300,- atau sekitar 59,25%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Infrastruktur dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Infrastruktur, Kasubbid Infrastruktur membina 10 SKPD. Ke 10 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DPUPRP	90,2	97,5	Tinggi
2	Dinas Kepemudaan & Olah Raga	78,8	78,7	Tinggi
3	Kec. Pelaihari	77,8	75,5	Tinggi
4	Kec. Kurau	94,1	93,5	Sangat Tinggi
5	Kec. Bumi Makmur	85,1	94,1	Sangat Tinggi

6	Kec. Bati-Bati	46,0	49,1	Sangat Rendah
7	Kec. Tambang Ulang	92,6	92,9	Sangat Tinggi
8	Kel. Pelaihari	82,3	92,1	Sangat Tinggi
9	Kel. Pabahanan	84,4	83,2	Tinggi
10	Kel. Sarang Halang	91,2	91,3	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Infrastruktur terllihat rata-rata Sangat Tinggi dan Tinggi, kecuali Kecamatan Bati-Bati yang katagorinya Sangat Rendah. Hal ini sebagai salah satu gambaran hasil fasilitasi dari Kasubbid Infrastruktur terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah.	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah** Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	46.051.900,-	26.487.500,-	100 11 kali monitoring	57,52 11 kali monitoring (100%)
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.				1 Dok Lap Monev	1 Dok Lap Monev (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Pengembangan Wilayah mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pengembangan Wilayah, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang Pengembangan Wilayah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring

dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasakan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	46.051.900,-	26.487.500,-	100 11 kali monitoring 1 Dok Lap Monev	57,52 11 kali monitoring (100%) 1 Dok Lap Monev (100%)

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 46.051.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.487.500,- (57,52%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan Monitoritng dan Evaluasi Kelompok Kerja Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi dalam perjalanannya dikarenakan adanya pandemi covid-19 kegiatan diatas tidak maksimal dilaksanakan dan terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Pengembangan Wilayah berjumlah Rp46.051.900,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp26.487.500,- atau sekitar 57,52%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Melihat kepada data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Pengembangan Wilayah dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Kasubbid Pengembangan Wilayah membina 11 SKPD. Ke 11 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DPRKPLH	91,8	94,5	Sangat Tinggi
2	DISKOMINFO	92,6	92,6	Sangat Tinggi
3	DISHUB	88,7	88,7	Tinggi
4	Kec. Panyipatan	88,7	88,7	Tinggi
5	Kec. Takisung	84,3	95	Tinggi
6	Kec. Jorong	87,6	87,6	Tinggi
7	Kec. Kintap	83,9	95,1	Tinggi
8	Kec. Bajuin	92,2	93,5	Sangat Tinggi

9	Kec. Batu Ampar	79,2	79,2	Tinggi
10	Kel. Angsau	95,9	95,9	Sangat Tinggi
11	Kel. Karang Taruna	67,8	58,8	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Pengembangan Wilayah terlihat rata-rata Sangat Tinggi dan Tinggi, kecuali Kelurahan Karang Taruna yang katagorinya Sedang. Hal ini sebagai salah satu gambaran hasil fasilitasi dari Kasubbid Pengembangan Wilayah terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan sangat baik.

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

Akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD 2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA**	76.872.880,-	34.484.500,-	100	44,86
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34.517.880,-	7.485.200,-	100	21,68
			Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	42.355.000,-	26.999.300,-	100	63,75

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mengampu 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi dan SDA untuk mencapai sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam.

Untuk Program Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA ini dialokasikan anggaran sebesar 76.872.880,- dan berhasil direalisasikan sebesar 34.484.500,- atau sekitar 44,86%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya. Pada kegiatan yang diampu oleh bidang ekonomi lebih mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD pada sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dalam kegiatan tersebut juga terdapat Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA** Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	42.355.000,-	26.999.300,-	100 5 kali rapat koordinasi perencanaan	63,75 5 kali rapat koordinasi perencanaan (100%).
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Pertanindagkop.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop				8 kali rakor lintas SKPD 12 kali rapat internal bidang.	8 kali rakor lintas SKPD (100%) 12 kali rapat internal bidang. (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi mengampu 1 Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Pertanindagkop, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian

Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Pertanindagkop dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasakan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	42.355.000,-	26.999.300,-	100 5 kali rapat koordinasi perencanaan 8 kali rakor lintas SKPD 12 kali rapat internal bidang.	63,75 5 kali rapat koordinasi perencanaan (100%). 8 kali rakor lintas SKPD (100%) 12 kali rapat internal bidang. (100%)

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 42.355.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.999.300,- (63,75%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang pertanian, industri, perdagangan dan Koperasi akan tetapi dalam perjalanannya dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :

Kecamatan Takisung

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi berjumlah Rp42.355.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar 26.999.300,- atau sekitar 63,75%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi, Kasubbid Pertanindagkop membina 5 SKPD. Ke 5 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DISNAKERIN	83,1	72,0	Tinggi
2	DKPP	79,8	91,9	Tinggi
3	DISKOPDAG	80,7	85,5	Tinggi
4	DISTANHORBUN	94,0	96,3	Sangat Tinggi
5	DISNAKESWAN	87,9	99,1	Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan & Koperasi terlihat rata-rata Tinggi, kecuali Distanhorbun yang katagorinya Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bawha hasil fasilitasi dari Kasubbid Pertanindagkop terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA** Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34.517.880,-	7.485.200,-	100 2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan	21,68 2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan (100%)
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.				2 kali rapat rakor fasilitasi SDA 2 kali rapat CSR (100%) 9 Kali Monev	2 kali rapat rakor fasilitasi SDA (100%) 2 kali rapat CSR (100%) 9 Kali Monev

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengampu 1 Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan

SKPD Lingkup sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Pertanindagkop SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasakan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34.517.880,-	7.485.200,-	100 2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan 2 kali rapat rakor fasilitasi SDA 2 kali rapat CSR (100%) 9 Kali Monev	21,68 2 kali rapat tim fasilitasi perencanaan (100%) 2 kali rapat rakor fasilitasi SDA (100%) 2 kali rapat CSR (100%) 9 Kali Monev

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 34.517.880,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.485.200,- (21,68%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran dan beberapa kegiatan monev tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :

Monev Tahun 2020, Dinas ; Pariwisata Program : Program Pengembangan Destinasi pariwisata Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana Pariwisata dan Prasarana Wisata, Pekerjaan : Pembangunan Pospantau Polisi Penunjuk arah, dan wahana Permainan

Monev Tahun 2020
Dinas : Pariwisata
Program : Program Pengembangan Destinasi pariwisata
Kegiatan : Peningkatan Pembangunan Sarana Pariwisata dan Prasarana Wisata
Pekerjaan : Pembangunan wahana Permainan

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berjumlah Rp34.517.880,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp7.485.200,- atau sekitar 21,68%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membina 4 SKPD. Ke 4 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DISPAR	83,1	72,0	Tinggi
2	DPMPTSP	79,8	91,9	Tinggi
3	BPKAD	80,7	85,5	Tinggi
4	BAPENDA	94,0	96,3	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terlihat rata-rata Tinggi, kecuali BAPENDA yang katagorinya Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya.

Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Buaya dengan RKPD 2. Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	**Program Perencanaan Sosial Budaya.** 1. Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan 2. Penanggulangan Kemiskinan Daerah **3.** Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	92.915.000,- 49.021.000,- 24.000.000,- 19.894.000,-	42.531.600,- 17.638.000,- 14.431.600,- 10.462.200,-	100 100 100 100	45,77 35,98 52,59 52,59

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Sosial Budaya mengampu 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya. Pada Bidang Sosial Budaya yang didalamnya terdapat kegiatan yang mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD sub bidang Politik, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD yang tergabung dalam sub bidang tersebut, di Bidang Sosial Budaya juga menjadi koordinator Kabupaten pada Program Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat.

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya ini dialokasikan anggaran sebesar Rp92.915.000,- dan berhasil direslisasikan sebesar Rp42.531.600,- atau sekitar 45,77%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH dikarenakan ada kegiatan yang dilakukan melalui media virtual. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya** Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	49.021.000,-	17.638.000,-	100 Monitoring di 11 Kecamatan	35,98 Monitoring di 11 Kecamatan (100%)
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Politik Pemerintahan.	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan.					

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Politik dan Pemerintahan mengampu 1 Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Politik dan Pemerintahan dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Politik & Pemerintahan, dan Kinerja Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD

Lingkup sub Bidang Politik Pemerintahan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Politik dan pemerintahan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Politik dan Pemerintahan pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasakan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	49.021.000,-	17.638.000,-	100 Monitoring di 11 Kecamatan	35,98 Monitoring di 11 Kecamatan (100%)

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Politik dan Pemerintahan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 49.021.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.638.000,- (35,98%). Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang Politik dan Pemerintahan akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran dan beberapa kegiatan monev tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Politik dan Pemerintahan berjumlah Rp49.021.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp17.638.000,-atau sekitar 35,98%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Politik dan Pemerintahan dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Politik dan Pemerintahan, Kasubbid Politik dan Pemerintahan membina 6 SKPD. Ke 6 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DPMD	80,6	98,7	Tinggi
2	BPBD	79,8	91,5	Tinggi
3	DP2KBP3A	84,9	84,9	Tinggi
4	KESBANGPOL	77,8	89,3	Tinggi
5	SATPOL PP DAN DAMKAR	92,7	98,1	Sangat Tinggi
6	DISPENDUKCAPIL	92,3	91,9	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Politik dan Pemerintahan terlihat rata-rata Tinggi, kecuali Satpol PP & Damkar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang katagorinya Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Politik dan Pemerintahan terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya** Penanggulangan Kemiskinan Daerah	24.000.000,-	14.431.600,-	100 2 kali rapat 1 Dokumen 100	52,59 1 kali rapat (50%) 1 dokumen (100%)
2.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Pembangunan SKPD Lingkup sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	19.894.000,-	10.462.200,-	52,59 Monitoring di 11 Kecamatan	Monitoring di 11 Kecamatan (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Sumber Daya manusia mengampu 2 Kegiatan yaitu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dan Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monev Capaian Pembangunan SKPD lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Sumber Daya Manusia pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasakan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	24.000.000,-	14.431.600,-	100 2 kali rapat 1 Dokumen 100	52,59 1 kali rapat (50%) 1 dokumen (100%) 52,59
	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	19.894.000,-	10.462.200,-	Monitoring di 11 Kecamatan	Monitoring di 11 Kecamatan (100%)

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 19.894.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.462.200,-. Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut meliputi rapat-rapat kegiatan pendampingan penyusunan dan evaluasi rencana kerja maupun perencanaan SKPD sub bidang Sumber Daya Manusia akan tetapi dikarenakan adanya pandemi covid-19 terkena refocusing anggaran. Dalam kegiatan ini juga terdapat monitoring dan evaluasi ke beberapa Kecamatan sebagai berikut :

Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas Angsau	3.887.725.000
Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas Angsau	500.000.000
Pengadaan Meubeler Pusk. Angsau	360.000.000
Pengadaan Genset Pusk. Angsau	80.000.000
Pengadaan AC Pusk. Angsau, 10 Unit	55.100.000
Pengadaan APAR Pusk. Angsau, Alat pemadam api ringan	5.250.000

Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas 100 %

Pengadaan Meubeluer 100 %

Instalasi Pengolahan Air Limbah 100 %

Pembangunan DAK Fisik Bidang Kesehatan
Kecamatan Bati Bati

➢ Puskesmas Pembantu Liang Anggang
➢Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu
➢Pagu Anggaran Rp . 516.705.000,-
➢Realisasi Fisik 70 %
➢Monev Tanggal 14 Nopember 2020

2. Kegiatan Penanggulan Kemiskinan pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.431.600,-. Pada kegiatan ini lebih banyak diisi oleh rapat-rapat tentang permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan program dari Pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Bidang Sosial Budaya merupakan koordinator di daerah.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Sumber Daya manusia dari 2 kegiatan yang dikelola berjumlah Rp43.894.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp24.893.800,- atau sekitar 56,71%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Sumber Daya manusia dilihat dari serapan anggaran berkatagori RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori TINGGI karena mencapai 87,5%.

Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kasubbid Sumber Daya Manusia membina 3 SKPD. Ke 3 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	DINKES	75,2	78,1	Sedang
2	DISDIK	89,0	89,0	Tinggi
3	DINSOS	74,3	74,3	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Sumber Daya Manusia terlihat rata-rata Sedang, kecuali Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang katagorinya Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Sumber Daya Manusia terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan cukup baik.

8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembagan Daerah.	Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan	**Program Penelitian dan Pengembangan**	289.537.500,-	143.787.600,-	100	49,66
			Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.460.000,-	121.094.500,-	100	49,74
			Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	46.077.500,-	22.693.100,-	100	49,25

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mengampu 1 program yaitu Program Penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Penelitian dan Pengembagan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan.

Untuk Program Penelitian dan pengembangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp289.537.500,-dan berhasil direslisasikan sebesar Rp143.787.600,- atau sekitar 49,66%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Kepala Sub Bidang di bawahnya yang akan diuraikan pada uraian berikutnya.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan dilihat dari serapan

anggaran berkatagori SANGAT RENDAH dikarenakan adanya perhitungan ulang yang mengakibatkan pengurangan anggaran dalam penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja dan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan gagal di lelangkan atau dilaksanakan. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi
1.	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya	**Program Penelitian dan Pengembangan** Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.460.000,-	121.094.500,-	100 1 dokumen ASB	49,74% 1 dokumen ASB (100%)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya mengampu 1 Kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.460.000,-	121.094.500,-	100 1 dokumen ASB	49,74% 1 dokumen ASB (100%)

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial Budaya pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 243.460.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.094.500,- (49,74%) serta terealisasi secara fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja, serapan anggaran dimaksud tidak terserap maksimal dikarena adanya justifikasi dari PPK yang menyatakan bahwa anggaran yang diperlukan untuk penyusunan dokumen tersebut dapat dikurangi.

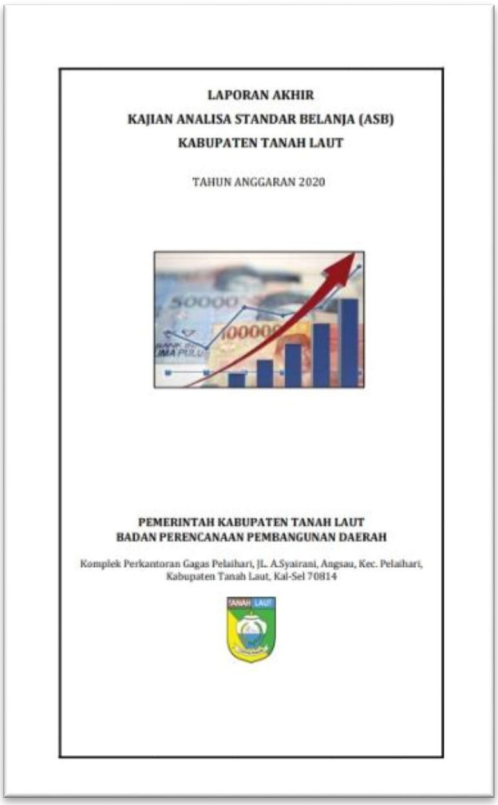

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya berjumlah Rp243.460.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp121.094.500,- atau sekitar 49,74%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya sebenarnya hanya mengemban 1 Indikator Kinerja yaitu Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, namun dalam pelaksanaan tugasnya diberi tambahan pekerjaan karena tergabung dalam Pokja Perencanaan sehingga Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya juga melakukan pendampingan terhadap SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Tetapi sekali lagi hal ini bukan indkator kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya. Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya membina 2 SKPD. Ke 2 SKPD dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja Keuangan
1	BKPSDM	67,9	83,3	Sedang
2	DISPUSIF	90,8	92,9	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya terlihat berkatagori Sedang dan katagori Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan cukup baik.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur.

Akuntabilitas Kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi
1.	Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial.	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur.	**Program Penelitian dan Pengembangan** Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur.	46.077.500,-	22.693.100,-	100 2 Kali Rapat 0 Dokumen	49,25 2 Kali Rapat (100%) 0 Dokumen

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur mengampu 1 Kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur pada tahun 2020 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur.	46.077.500,-	22.693.100,-	100 2 Kali Rapat 0 Dokumen	49,25 2 Kali Rapat (100%) 0 Dokumen

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur pada tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.

46.077.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.693.100,- (49,25%) serta terealisasi secara fisik sebesar 100%. Dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir penyusunan Dokumen Grand Design Penataan Perkotaan, tetapi dikarena adanya masa pademi Covid-19 anggaran penyusunan dokumen tersebut terkena refocusing.

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur berjumlah Rp46.077.500,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp22.693.100,- atau sekitar 49,25%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dilihat dari serapan anggaran berkatagori SANGAT RENDAH. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%. Hanya saja kinerja fisik ini kurang maksimal karena tidak ada dokumen penelitian yang dihasilkan karena dipangkas anggarannya untuk penanganan covid-19.

Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur, sebagaimana Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya sebenarnya juga hanya mengemban 1 Indikator Kinerja yaitu Jumlah Dokumen Kajian Bidang Infrastruktur, namun dalam pelaksanaan tugasnya diberi tambahan pekerjaan karena tergabung dalam Pokja Perencanaan sehingga Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur juga melakukan pendampingan terhadap SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Tetapi sekali lagi hal ini bukan indkator kinerja Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur. Terkait kinerja capaian pembangunan SKPD Lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur membina 1 SKPD yaitu Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Bagian. Ke 9 Bagian dan capaian pembangunannya dilihat dari serapan anggaran dan kinerja fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	SKPD	Kinerja Keuangan (%)	Kinerja Fisik (%)	Kriteria Penilaian klasifikasi kinerja

				Keuangan
1	Bagian Pengadaan Barang Jasa	76,6	76,6	Tinggi
2	Bagian Perekonomian Pembangunan	85,6	85,6	Tinggi
3	Bagian Tata Usaha dan Keuangan	92,9	92,9	Sangat Tinggi
4	Bagian Tata Pemerintahan	55,8	55,8	Rendah
5	Bagian Hukum	90,3	90,3	Tinggi
6	Bagian Organisasi	48,4	73,8	Sangat Rendah
7	Bagian Kesra	94,0	94,0	Sangat Tinggi
8	Bagian Humas dan Protokol	91,9	91,9	Sangat Tinggi
9	Bagian Umum	76,8	76,8	Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari SKPD Lingkup sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur terlihat bervariasi antara yang Sangat Rendah dan yang Sangat Tinggi. Rata-rata Tinggi dan Sangat Tinggi. Ini menunjukkan bahwa hasil fasilitasi dari Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur terhadap Penyusunan Perencanaan dan capaian kinerja dari SKPD-SKPD tersebut telah berjalan dengan baik.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2020, Bappeda melaksanakan 9 Program dan 26 kegiatan. Dari 26 kegiatan tersebut terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkait pandemi covid-19 (kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan), dihapuskannya anggaran saat refocusing (kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya), dan karena pertimbangan lain yaitu kurang maksimal manfaatnya apabila tetap dilaksanakan (kegiatan Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD). Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Bappeda Tahun 2020.

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
					Keuangan (%)	Fisik (%)
A	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**		987.237.784,-	917.209.510,-	92,91	100
		Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	404.506.689,-	389.806.173,-	96,37	100
		Penyediaan jasa, bahan, peralatan	255.954.295,-	204.509.871,-	79,90	100

		dan perlengkapan perkantoran				
		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	326.776.800,-	322.893.466,-	98,81	100
B	**Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia**		965.570.000,-	867.045.750,-	89,80	100
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	396.702.400,-	373.980.000,-	94,27	100
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	170.943.000,-	108.516.750,-	63,48	100
		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	382.924.600,-	374.049.000,-	97,68	100
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	15.000.000,-	10.500.000,-	70	100
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,-	0,-	0	0
C	**Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD**		45.000.000,-	0,-	0	0
		Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,-	0,-	0	0
		Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	25.000.000,-	0,-	0	0
D	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD**		23.967.600,-	19.520.700,-	81,45	100
		Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	8.668.700,-	6.296.800,-	72,64	100
		Penyusunan laporan keuangan	9.134.200,-	7.538.900,-	82,53	100
		Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	6.164.700,-	5.685.000	92,22	100
E	**Program Penelitian dan Pengembangan**		289.537.500,-	143.787.600,-	49,66	100

		Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	243.460.000,-	121.094.500,-	49,74	100
		Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	46.077.500,-	22.693.100,-	49,25	100
F	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah**		131.209.400,-	76.942.800,-	58,64	100
		Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	46.051.900,-	26.487.500,-	57,52	100
		Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	85.157.500,-	50.455.300,-	59,25	100
G	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**		915.298.280,-	445.775.400,-	48,70	100
		Penyusunan RKPD	632.628.100,-	365.183.000,-	57,72	100
		Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	84.806.000,-	51.186.800,-	60,36	100
		Review RPJMD	194.625.880,-	27.119.600,-	13,93	100
		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	3.238.300,-	2.286.000,-	70,59	100
H	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA**		76.872.880,-	34.484.500,-	44,86	100
		Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	34.517.880,-	7.485.200,-	21,68	100
		Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	42.355.000,-	26.999.300,-	63,75	100

I	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**		92.915.000,-	42.531.600,-	45,77	96,67
		Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	49.021.000,-	17.638.000,-	35,98	100
		Penanggulangan Kemiskinan Daerah	24.000.000,-	14.431.600,-	60,13	90
		Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	19.894.000,-	10.462.200	52,59	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, Bappeda mengelola anggaran sebesar Rp3.527.608.444,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.547.297.860,- atau sekitar 74,64%. Dengan menggunakan skala penilaian sebagaimana telah dicantuman diatas dapat dikatakan bahwa capaian realisasi Bappeda masih bernilai SEDANG, meskipun sebenarnya diharapkan dapat lebih baik lagi. Besaran capaian ini banyak terpengaruh oleh situasi dan kondisi Pandemi sehingga tupoksi Bappeda yang lebih banyak melakukan koordinasi dalam bentuk rapat-rapat secara tatap muka dan sebagian yang lain melibatkan kerjsama dengan pihak ketiga yang didalamnya ada dana narasumber menjadi terkendala dengan berbagai pembatasan untuk menghindari memburuknya situasi akibat pandemi. Dengan minimnya pertemuan tatap muka dan kerjasama tersebut berpengaruh pada serapan anggaran yang bisa direalisasikan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2020 Bappeda mengampu 9 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Bappeda. Sasaran Strategis Bappeda meliputi 6 Sasaran yaitu :

1) Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.
2) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya
3) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.
4) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

Sedangkan 9 program tersebut meliputi :

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA
4) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah
5) Program Penelitian dan Pengembangan
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7) Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
8) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
9) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD

Terkait dengan anggaran dan realisasi dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	987.237.784,-	92,91	100
		Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	965.570.000,-	89,80	100
		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	45.000.000,-	0	0
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23.967.600,-	81,45	100

2.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	289.537.500,-	49,66	100
3.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah	131.209.400,-	58,64	100
4.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	915.298.280,-	48,70	100
5.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA	76.872.880,-	44,86	100
6.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	92.915.000,-	45,77	96,67

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran dan realisasi masing-masing sasaran dan programnya yaitu :

1) Sasaran I : Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

   Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar RP915.298.280,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 48,70%.

2) Sasaran II : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan SKPD Lingkup Sosial budaya.

   Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Perencanaan Sosial Budaya. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar RP92.915.000,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 45,77%.

3) Sasaran III : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Ekonomi dan SDA.

   Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp76.872.880,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 44,86%.

4) Sasaran IV : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan pembangunan Lingkup Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

   Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp131.209.400,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 58,64%.

5) Sasaran V : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.

   Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Penelitian dan Pengembangan. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp289.537.500,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 49,66%.

6) Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.

   Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan 4 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD, dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD. Dana yang dianggarkan untuk Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp987.237.784,- dengan realisasi sebesar 92,91%, Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia menggunakan anggaran sebesar Rp965.570.000,- dengan capaian 89,80. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD dianggarkan sebesar Rp45.000.000,- namun program ini tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran dan adanya pandemi covid-19,

dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD yang dianggarkan didukung dana sebesar Rp23.967.600,- dan terealisasi sebesar 81,45%.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020.

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2019 dan Tahun 2020. Perbandingan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara paralel per program dan kegiatan karena ada sebagian program atau kegiatan yang ada di tahun 2019 tetapi tidak ada lagi di tahun 2020. Demikian pula sebaliknya, ada program kegiatan yang ada di tahun 2020 tetapi tidak ada di tahun 2019. Terdapat pula perubahan nama program yang diakibatkan numenklatur yang berbeda disebabkan aturan yang digunakan di tahun 2019 adalah numenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 13 sedangkan pada tahun 2020 menggunakan numenklatur dari Permendagri 90 Tahun 2019.

Pada Tabel dibawah ada kode NA yang berarti “Not Available”. Kode ini muncul untuk menggambarkan ketidakadaan pasangan untuk diperbandingkan. Bisa jadi kode NA muncul di 2019, berarti program atau kegiatan itu baru muncul di Tahun 2020 dan tidak ada di Tahun 2019, demikian pula sebaliknya, ketika kode NA muncul di Tahun 2020 maka berarti kegiatan yg dulunya ada di tahun 2019, tidak lagi ada di tahun 2020.

Mengingat bahwa perbandingan ditujukan untuk melihat efisiensi capaian angaran maka semua Program dan kegiatan yang mengandung kode NA akan diabaikan kecuali kalau hanya terjadi perubahan numenklatur saja, bukan karena memang tidak ada program atau kegiatannya di kedua tahun yang diperbandingkan. Untuk melihat perbandingan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Program / Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A	**Program Pelayanan jasa Administrasi Perkantoran**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.906.439.650,	987.237.784,-	92,70	92,91
1	Penyediaan jasa	Penyediaan jasa,	210.402.750,-	255.954.295,-	61,15	79,90

	komunikasi, sumber daya air dan listrik	bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran				
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan		3.090.000,-		43,11	
3	Penyediaan jasa kebesihan kantor		4.246.700,-		73,87	
4	Penyediaan alat tulis kantor		35.861.800,-		89,62	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		20.950.500,-		90,36	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		34.243.900,-		28,40	
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		33.2583.000,-		70,22	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		2.904.000,-		100	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	46.350.000,	389.806.173,-	82,20	96,37
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		1.179.750.000,		100	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		62.861.000,		99,41	
12	Penyedia jasa penunjang kinerja SKPD	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	272.521.000	326.776.800,-	97,89	98,81
B	**Program peningkatan sarana dan prasana aparatur**	**Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	498.530.000,-	965.570.000,-	72,85	89,80
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	NA	70.000.000,-	NA	91,43	NA
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	221.140.000,-	396.702.400,-	88,59	94,27
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	139.510.000,-	170.943.000,-	51,60	63,48
4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		47.880.000,-		26,28	
5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	20.000.000,-	382.924.600,-	93,48	97,68
C	**Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD**	10.985.100,-	23.967.600,-	71,64	81,45
1	Penyusunan laporan	Penyusunan laporan	10.985.100,-	9.134.200,-	71,64	82,53

	capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	keuangan				
	NA	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	NA	6.164.700,-	NA	92,22
D	**Program penelitian dan pengembangan**	**Program Penelitian dan Pengembangan**	684.321.750,-	289.537.500,-	31,26	49,66
1	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi & sosial budaya	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	205.559.700,-	243.460.000,-	77,44	49,74
2	Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur.	Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur	478.762.050,-	46.077.500,-	11,44	49,25
E	**Program pengembangan perumahan**	NA	278.220.300,-	NA	95,97	NA
1	1. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan	NA	278.220.300,-	NA	95,97	NA
F	**Program lingkungan sehat perumahan**	NA	42.002.000,-	NA	92,57	NA
1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	NA	42.002.000,-	NA	92,57	NA
G	**Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	NA	350.918.550,-	NA	88,85	NA
1	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	NA	350.918.550,-	NA	88,85	NA
H	NA	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktrur dan Pengembangan Wilayah**	NA	131.209.400,-	NA	58,64
	NA	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah	NA	46.051.900,-	NA	57,52
	NA	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah	NA	85.157.500,-	NA	59,52
I	**Program kerjasama**	**Program**	160.250.000,-	45.000.000,-	22,74	0

	informasi dengan mass media	**Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD**				
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	160.250.000,-	20.000.000,-	22,74	0
	NA	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	NA	25.000.000,-	NA	0
J	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia**	230.289.950,-	15.000.000,-	20,43	70
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	230.289.950,-	15.000.000,-	20,43	70
	NA	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	NA	0	NA	0
K	**Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	NA	0	NA	0	NA
1	Rencana aksi daerah percepatan pemberantansan korupsi	NA	0	NA	0	NA
L	**Program perencanaan pembangunan daerah**	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.144.278.000,	915.298.280,-	56,43	
1	Penetapan RPJMD	Review RPJMD	206.370.000,-	194.625.880,-	40,39	13,93
2	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Penyusunan RKPD	629.133.700,-	632.628.100,-	53,78	57,72
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	92.032.700,-	84.806.000,-	30,63	60,36
4	Pengendaliaan pelaksanaan DAK		21.933.600,-		59,52	
5	Penanggulangan kemiskinan daerah	Penanggulangan Kemiskinan Daerah *(Menjadi kegiatan yg masuk ke Prog. Perencanaan Sosial Budaya)*	184.808.500,-	24.000.000,-	94,75	60,13
6	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD *(Menjadi kegiatan yg masuk ke dalam program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD)*	9.999.500,-	8.668.700,-	76,65	72,64

7	NA	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	NA	3.238.300,-	NA	70,59
M	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA**	246.401.050,-	76.872.880,-	23,01	44,86
1	Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	98.992.200,-	34.517.880,-	18,53	21,68
2	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi	121.390.000,-	42.355.000,-	17,58	63,75
3	Koordinasi perencanaan pengembangan kawasan industri	NA	26.018.850,-	NA	65,46	NA
N	**Program perencanaan sosial budaya**	**Program Perencanaan Sosial dan Budaya**	56.558.100,-	92.915.000,-		45,77
1	Pelaksanaan program PISEW	NA	0	NA	0	NA
	NA	Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDM	0	19.894.000,-	0	52,59
2	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan	56.558.100,-	49.021.000,-	64,04	35,98

Dari tabel diatas dapat diketahui :

1) Program Pelayanan Jasa Administrasi (2019) dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2020). Program ini isinya relatif sama, hanya berbeda numenklatur program dan kegiatannya saja. Di tahun 2020, terdapat penyederhanaan nama kegiatan dengan nama kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran. Satu kegiatan ini merangkum 8 kegiatan yang ada di tahun 2019 yaitu (1) kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; (2) Penyediaan jasa administrasi keuangan; (3) Penyediaan jasa kebesihan kantor; (4) Penyediaan alat tulis kantor; (5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; (6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; (7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (8) Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang undangan; Rerata dari serapan 8 kegiatan yang ada di tahun 2019 menunjukkan hasil serapan sebesar 69,59%, sedangkan di tahun 2020 tercapai 79,90%. Terlihat bahwa pencapaian di tahun 2020 tercapai dengan lebih baik. Selain pada kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran (2020), terdapat kegiatan lain yang merangkum beberapa kegiatan yang ada di tahun 2019 yaitu kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi yang merangkum kegiatan 2019 yaitu : (1) Penyediaan makanan dan minuman; (2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; (3) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Rerata dari serapan 3 kegiatan yang ada di tahun 2019 tersebut menunjukkan hasil serapan sebesar 93,87%, sedangkan di tahun 2020 tercapai 96,37%. Terlihat bahwa pencapaian di tahun 2020 juga tercapai dengan lebih baik. Adapun kegiatan yang numenklaturnya hampir sama di tahun 2019 dan 2020 adalah kegiatan Penyedia jasa penunjang kinerja SKPD (2019) dan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD (2020). Dilihat dari sisi serapan, serapan di tahun 2020 terlihat lebih baik yaitu 89,80% dibanding serapan di tahun 2019 yang hanya mencapai 72,85%.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi anggaran pada pada level program, realisasi di Tahun 2019 mencapai 92,70% sedangkan pada tahun 2020 realisasi mencapai 92,91. Dari perbandingan ini dapat dikatakan bahwa capaian realisasi anggaran di tahun 2020 tercapai lebih tinggi. Belum lagi jika dilihat dari pagu anggaran yang lebih sedikit di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Kedua kondisi ini menunjukkan anggaran di tahun 2020 teranggarkan dan terserap secara lebih efisien.

2) Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur (2019) dan Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia (2020).

Tabel menunjukkan bahwa di level program, dari sisi serapan anggaran di tahun 2020 mencapai 89,80%, serapan ini lebaih baik dari pelaksanaan di tahun 2019 yang hanya mencapai 72,85%. Jika dilihat secara lebih mendalam maka serapan di tahun 2020 juga lebih baik dari tahun 2019. Ini menunjukka adanya perbaikan kinerja terhadap pelaksanaan di tahun 2020. Pada tahun 2020 juga

terdapat perangkuman kegiatan tahun 2019 dari 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (2020) yang merangkum kegiatan (1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan (2) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor. Rerata dari kedua kegiatan di tahun 2019 menghasilkan serapan sebesar 38,94%, sedangkan di tahun 2020 mencapai serapan 63,48%. Kegiatan lainnya yang dapat diperbandingkan adalah kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor (2019) dengan capaian 88,59%, sedangkan di tahun 2020 mencapai 94,27%. Pencapaian di tahun 2020 juga menunjukkan angka yang lebih baik. Kegiatan lain yang juga dapat diperbandingkan adalah kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (2019) dengan kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor (2020). Tabel menunjukkan bahwa serapan tahun 2020 juga lebih baik yaitu mencapai 97,68% dibanding serapan tahun 2019 yang hanya mencapai 93,48%.

3) Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2019) dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (2020).

   Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksaan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (2019) menggunakan anggaran Rp10.985.100,- dan terealisasi sebesar 71,64%. Pada tahun 2020, kegiatan ini berubah numenklatur menjadi kegiatan Penyusunan Laporan keuangan dengan anggaran dana Rp9.134.200,- dan terealisasi sebesar 82,53%. Dari perbandingan capaian realisasi anggaran dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan lebih baik di tahun 2020.

4) Program Penelitian dan Pengembangan (2019) dan Program Penelitian dan Pengembangan (2020).

   Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa numenklatur program tidak berubah. Demikan pula dengan jumlah kegiatan yang terkait program ini. Perubahan hanya terdapat pada numenklatur kegiatan. Pada tahun 2019, kegiatan Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang ekonomi & sosial budaya berubah namanya menjadi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan

Budaya. Jika dilihat kepada anggaran yang dialokasikan, tahun 2019 diangarkan sebesar Rp205.559.700,- dengan capaian sebesar 77,44%. Sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan dana lebih besar yaitu Rp243.460.000,- dengan capaian 49,74%. Jadi terlihat meskipun anggaran dialokasikan lebih besar namun realisasinya hanya mencapai 47,74% saja.

Pada kegiatan lainnya yaitu Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur (2019) berubah numenklatur kegiatannya menjadi Penelitian dan Pengembangan Serta Review Hasil Penelitian Bidang Infrastruktur (2020). Pada kegiatan ini dianggarkan dana lebih besar ditahun 2019 namun capaiannnya hanya 11,44%. Pada tahun 2020 untuk kegiatan bidang infrastruktur ini hanya dianggarkan sebesar Rp46.007.500,- akibat terkena refocusing angaran. Dari dana Rp46.007.500,- hanya terealiasi sebesar 49,25%.

5) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media (2019) dan Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD (2020).

   Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk program ini hanya ada 1 kegiatan yang dapat dibandingkan, itupun perbandingannya kurang menarik untuk dibicarakan. Pada tahun 2019, kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan pameran pembangunan dan pameran anggrek dengan dana Rp160.250.000,- dan terealisasi sebesar 22,74%. Ditahun 2020, karena kondisi pandemi maka kegiatan pameran ditiadakan sehingga dana Rp20.000.000,- yang dianggarakan tidak direalisasikan.

6) Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah (2019) dan Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia (2020).

   Pada Program ini hanya ada 1 kegiatan yang dapat dibandingkan yaitu kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana (2019) dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur (2020). Pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp230.289.950,- dengan capaian 20,43%. Sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan Rp15.000.000,- dan terealisasi sebesar 70%. Secara perbandingan realisasi memang capaian di tahun 2020 jauh lebih tinggi dari capaian di tahun 2019, tetapi jika dilihat dari pagu

anggaran maka capaian 70% ini tidak berarti apa-apa karena anggaran 2019 berpuluh kali lipat dari anggaran 2020. Kembali penyebab dari kondisi rendanya penganggaran ini akibat adanya kebijakan refocusing anggaran terkait situasi pandemi.

7) Program perencanaan pembangunan daerah (2019) dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2020).

   Program ini merupakan ruhnya Bappeda karena menyangku perencanaan dan produk layanan Bappeda selaku institusi perencana di daerah. Kegiatan yang ada di Program inipun relatif sama dan kalaupun berbeda hanya pada penamaan kegiatan saja. Pada tahun 2019 terdapat 6 kegiatan namun pada 2020 hanya ada 4 kegiatan. Berkurangnya kegiatan ini disebabkan ada 2 kegiatan yang semula termasuk di dalam program Perencanaan Pembangunan Daerah dipindahkan ke Program lain yaitu Kegiatan Penanggulangan kemiskinan daerah dipindahkan menjadi kegiatan pada program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, dan Kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD menjadi kegiatan di program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan di Sekretariat dalam bentuk kegiatan Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD.

   Kegiatan Penetapan RPJMD yang pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp206.370.000,- terealisasi sebesar 40,39%. Pada tahun 2020, Kegiatan ini berubah menjadi kegiatan Review RPJMD dengan pagu anggaran 194.625.880,- dengan realisasi 13,93%. Ini menunjukkan serapan anggaran ditahun 2019 masih lebih baik dibandingkan serapan anggaran 2020.

   Pada kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD (2019) dianggarakan dana sebesar Rp629.133.700,- dan terealisasi sebesar 53,78%. Pada tahun 2020, kegiatan tersebut menjadi kegiatan Penyusunan RKPD dengan apgu anggaran Rp632.628.100,- dan teraliasasi sebesar 57,72. Dari kondisi ini terlihat capaian di tahun 2020 memang lebih baik dari capaian tahun 2019.

   Pada Tahun 2020 terdapat perangkuman 2 kegiatan tahun 2019 yaitu kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan Pengendaliaan pelaksanaan DAK dirangkum menjadi kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.

Untuk Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (2019) dianggarkan sebesar Rp92.032.700,- dan terealisasi sebesar 30,63%. Kegiatan Pengendaliaan pelaksanaan DAK dianggarkan dana Rp21.933.600,- dengan realisasi sebesar 59,52%. Jika capaian realisasi kedua kegiatan ini dirata-ratakan maka menghasilkan angka capaian sebesar 45.07%. Angka capaian 45.01 persen ini lebih rendah dari capaian kegiatan yang merangkum kedua kegiatan di tahun 2019 tersebut yaitu kegiatan Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan yang pada tahun 2020 mencapai serapan sebesar 60,36%. Dengan demikian capaian tahun 2020 lebih baik dari capaian tahun 2019.

Untuk kegiatan Penanggulangan kemiskinan daerah (2019) berubah posisinya dari semula termasuk dalam program Program perencanaan pembangunan daerah di tahun 2019, menjadi termasuk kedalam program Perencanaan Sosial Budaya pada tahun 2020. Pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp184.808.500,- dan terealisasi sebesar 94,75%. Pada tahun 2020 hanya dianggarkan Rp24.000.000,- dan terealisasi sebesar 60,13%. Angka capaian dari kedua tahun pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2019 masih lebih baik dibanding tahun 2020.

Untuk kegiatan Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD (2019) yang semula berada dalam program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2019, berubah menjadi kegiatan pada program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD pada tahun 2020. Pada kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp.9.999.500,- dan terealisasi sebesar 76,65%. Sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan dana sebesar Rp.8668.700,- terealisasi sebesar 72,64%. Dari perbandingan capaian kedua tahun tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2019 lebih baik dibandingkan pelaksanaannya di tahun 2020.

8) Program perencanaan pembangunan ekonomi (2019) dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA (2020).

Pada program ini terdapat 2 kegiatan yang dapat dibandingkan pencapaiannya. 1 kegiatan yang lain tidak dapat diperbandingkan karena hanya ada di tahun 2019 dan tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2020.

Kegiatan Pengembangan usaha sumber daya alam dan ekonomi kreatif (2019) berganti namanya menjadi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang SDA, Pengembangan Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2020. Pada kegiatan ini dianggarakan dana sebesar Rp98.992.200,- dan terealisasi sebesar atau sekitar 18,53%. Pada tahun 2020 dianggarkan Rp34.517.880,- dan terealisasi sebesar 21,68%. JIka dilihat dari angka realisasinya dapat dikatakan bahwa pencapaian di tahun 2020 tidak terlalu signifikan perbedaannya karena dana di tahun 2019 justru lebih besar yaitu hampir 2 kali lipat penganggaran 2020.

Kegiatan lainnya di program ini adalah kegiatan Perencanaan pembangunan bidang ekonomi (2019) yang berubah menjadi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi di tahun 2020. Pada tahun 2019 dianggarakan sebesar Rp121.390.000,- dan terealisasi sebesar 17,58% , sedangkan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp42.355.000,- dengan realisasi sebesar 63,75%. Dengan membandingkan angka realisasi tersebut masih dapat dikatakan bahwa pencapaian pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2020 masih lebih baik daripada pencapaian di tahun 2019.

9) Program perencanaan sosial budaya (2019) dan Program Perencanaan Sosial dan Budaya (2020).

Dari tabel diatas Pada program ini hanya ada 1 kegiatan yang dapat dibandingkan pelaksanaannya ditahun 2019 dan tahun 2020 yaitu kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya (2019) yang namanya berubah menjadi Perencanaan Pembangunan sub Bidang Politik dan Pemerintahan. Pada tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp56.558.100,- dengan realisasi sebesar 64,04%. Pada tahun 2020 dianggarkan sebesar 49.021.000,- dan terealisasi sebesar 35,98%. Dari perbandingan persentase capaian tersebut dapat dikatakan kinerja pelaksaaan kegiatan di tahun 2019 lebih baik dari tahun 2020.

Bab IV
PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja ini diketahui bahwa :

1. Pada Anggaran Murni tahun 2020, Bappeda mengelola Anggaran sebesar Rp12.087.447.135,- yang kemudian mengalami refocusing disebabkan adanya pendemi covid-19 menurun menjadi Rp8.977.400.135,-. Anggaran tersebut kemudian terkoreksi kembali meningkat pada APBD Perubahan 2020 menjadi menjadi Rp9.756.295.170,-.
2. Belanja Langsung Bappeda pada Anggaran Murni 2020 sebesar Rp5.606.863.320,- yang kemudian direfocusing menurun menjadi Rp2.748.713.409,-. Anggaran ini terkoreksi lagi meningkat menjadi 3.527.608.444,- pada APBD 2020 Perubahaan.
3. Belanja Tidak Langsung Bappeda pada Anggaran Murni sebesar Rp6.480.584.134,- Pada saat terjadi refocusing menurun menjadi Rp6.228.686.726,-. Anggaran ini tetap bertahan pada APBD 2020 Perubahan.
4. Hasil serapan keuangan pada anggaran tahun 2020 adalah sebesar 74,64 % yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 76,78% ini berarti terjadi penurunan serapan sekitar 2,14%. Penurunan serapan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilakukan seperti pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tatap muka yang kemudian harus disesuaikan menjadi pertemuan secara daring (dalam jaringan) atau secara online. Selain itu banyak kegiatan Rapat koordinasi ke pemerintan Propinsi dan Pusat yang juga tidak dapat dilaksanakan. Meskipun terjadi penurunan tetapi penurunan capaian ini tidak menurun secara sgnifikan.
5. Hasil realisasi fisik pada anggaran tahun 2020 adalah sebesar 95,80% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 96,74% ini berarti terjadi penurunan kinerja fisik sekitar 0,94%. Penurunan ini

juga disebabkan pengaruh kondisi covid-19, dan sama dengan penurunan di serapan keuangan yang tidak signifikan, penurunan capaian kegiata fisik sebesar 0,94% ini juga tidak signifikan.

6. Pada laporan kinerja tahun 2020 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

D. Strategi Peningkatan Kinerja.

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada Bappeda Tanah Laut yaitu :

1. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif lagi terutama pada bidang-bidang yang serapan anggarannya berada di sekitar 50 persen. Penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran pada zona nyaman dan cenderung sama dan rutin setiap tahun.
2. Pandemi Covid-19 sepertinya masih akan berlanjut di tahun 2021 sehingga SKPD harus bersiap melakukan penyesuaian apabila akan ada refocusing anggaran jilid II. Penghematan harus dilakukan pada level perencanaan, menghitung keperluan minimal dan menyerap anggaran secara maksimal.
3. Koordinasi dengan SKPD harus terus ditingkatkan sehingga peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan SKPD semakin dapat diwujudkan dan kinerja Bappeda dan SKPD dapat lebih meningkat.
4. Mengingat perencanaan yang dihasilkan sangat tergantung dengan kualitas SDM Perencananya maka kualitas SDM perencana ini harus terus dilakukan. Perlu dilakukan bintek kepada SDM perencana karena sistem perencanaan yang berlaku sekarang yaitu SIPD belum dikuasai dengan optimal oleh SDM Perencana se Kabupaten.

-o0o-

Lampiran :

8. IKU
9. Pernyataan Hasil Reviu
10. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
11. Cascading/Pohon Kinerja
12. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
13. Monev Renstra
14. Matrik Keselarasan.